PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas)

Astri Fajriah Anggraeni
Siti Kurnia Rahayu
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur No.112-116 Bandung 40132
E-mail : astrifaj@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted on KPP Pratama Cicadas, increase in the number of individual tax payers and reporting notification letters is one of factors that influence to individual tax revenue. A phenomena that occurs in this study on the increase in the number of tax payers a private person is still many people did not register himself astaxpayers and the reporting notification letters of many taxpayers who didn't submit his tax return and report that caused individual tax revenue not reach the target.

The purpose of this study was to determine the influence of the increase in the number of individual tax payers and reporting notification letters to individual tax revenue on KPP Pratama Cicadas.

In this research used descriptive and verification method with quantitative approach. The test statistic used is multiple linear regression analysis, correlation analysis, analysis of the determinant coefficient, hypothesis test (t test).

The results of this study show the influence of increase in the number of individual tax payers to individual tax revenue and reporting notification letters influence on individual tax revenue.

Keywords : *Individual Tax Payers, Reporting Notification Letters and Individual Tax Revenue*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pendahuluan

Salah satu penerimaan pajak yang sangat potensial yang dipungut pemerintah secara langsung adalah pajak penghasilan yaitu beban pajak tersebut menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan dalam arti tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain (Judisseno, 2005:85). Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mengingat adanya dua fungsi yang melekat pada pajak (*budgetair* dan *regulerend*), maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, juga menggenjot penerimaan negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:25). Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan peran penting bagi kehidupan negara (Mardiasmo, 2009:29).

Fenomenanya Kementerian Keuangan (2016) menyatakan bahwa realisasi penerimaan pajak sampai akhir Mei 2016 mencapai Rp364,1 triliun. Jumlah tersebut hanyalah 26,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Dibanding periode yang sama pada akhir Mei 2015 dimana penerimaan pajak mencapai Rp377,03 triliun, jumlah itu merosot 3 persen.Jebloknya realisasi penerimaan pajak 2016 tak lepas dari rendahnya penerimaan Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang selama ini menjadi andalan. PPh Pasal 25/29 yang mencerminkan penerimaan pajak dari orang pribadi non-karyawan per akhir Mei 2016 baru sebesar Rp3,4 triliun. Capaian tersebut masih jauh lebih rendah dibanding target Menteri

Keuangan Bambang Brodjonegoro yang ingin PPh orang pribadi non-karyawan bisa mencapai Rp18 triliun.

Surat Pemberitahuan adalah surat atau alat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mulai dari melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban dalam suatu tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 11 UU KUP. Pengaturan Surat Pemberitahuan tersebut selanjutnya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan.

Fenomena yang terjadi bahwa Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, Wajib Pajak yang diwajibkan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan jumlahnya mencapai 22 juta, baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan.Pada pelaporan Surat Pemberitahuan periode pajak 2015, dari total Wajib Pajak hanya sekitar 12,5 juta Wajib Pajak yang melaporkan, itu pun dengan catatan dalam satu tahun penuh di 2016 karena banyak Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan. Ditjen Pajak Kementerian Keuangan mencatat telah ada 5,3 juta Wajib Pajak (WP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2016. Namun, angka tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan jumlah total WP yang wajib melaporkan yakni sebanyak 22 juta Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan(Hestu Yoga Saksama,2017).

Masyarakat yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kewajiban Wajib Pajak (WP) terdaftar adalah membayar dan melaporkan pajak yang dikenakan sesuai peraturan yang berlaku. Tetapi, pada kenyataannya sebagaimana diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan antara lain non aktif, bubar, meninggal dunia dan sebagainya, maka muncullah istilah Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.2/1988 tentang Kriteria Wajib Pajak Efektif dan Non Efektif. Wajib Pajak Efektif yaitu Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari pemenuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari tidak dipenuhinya penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan.

Fenomena yang terjadi bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan hingga tahun 2015, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Non Karyawan, dan 22.332.086 Wajib Pajak OP Karyawan. Sementara itu, jumlah wajib pajak baru lanjut Yon, baru mencapai angka 48.000. Namun, jumlah tersebut tambahan wajib pajak baru yang hanya berasal dari program amnesti pajak saja.Menurut Yon, ada wajib pajak baru lainnya yang selain karena program amnesti pajak. Sayangnya Yon mengaku belum memegang dengan potensi wajib pajak baru yang ada. Dari total 60 juta yang seharusnya memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), baru 36 juta yang tercatat memiliki NPWP.

Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan Bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan antara Peningkatan Jumlah Wajib Pajak dengan penerimaan Pajak Penghasilan. Bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan Peningkatan Jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (Rahmad, Herawati dan Dandes,2014).Penelitian yang dilakukan oleh Prastyo Bangun Nuswantara (2010) yang menyatakan bahwa variabel jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menunjukan hasil yang signifikan.Pengaruh ini ditunjukan dengan semakin besar jumlah penerimaan pajak penghasilan begitu pula sebaliknya.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana jumlah wajib pajak orang pribadi dan Pelaporan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan PPh dengan judul **"Pengaruh Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas namun tidak sebanding dengan penerimaan pajak penghasilan -nya.
2. Tingkat pelaporan Surat pemberitahuan tidak sebanding dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
2. Seberapa besar pengaruh Pelaporan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode dan teknik yang tepat tentang Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan pelaporan surat pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui seberapa besar pengaruh Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.
2. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh Pelaporan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengadakan perbaikan yang terkait atau berhubungan dengan pelaksanaan penelitian. Dan hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan informasi ilmiah untuk mengembangkan ilmu yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam penelitian lebih lanjut. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti terhadap penerapan teori – teori mengenai diskusi pemecahan masalah dalam memberikan persoalan yang terjadi sekaligus penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu ekonomi secara umum dan pengembangan ilmu perpajakan khususnya.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisikan pemaparan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengaruh peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi dan pelaporan surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2.1.1 Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang pribadi

2.1.1.1 Pengertian Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:163) Wajib Pajak adalah:Orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak dan pemotongan pajak tertentu.

Menurut Erly Suandi (2011:105) definisi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut : Wajib Pajak Orang pribadi menurut ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi merupakan selisih wajib pajak yang berada di suatu kantor pelayanan pajak tertentu yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari sumber-sumber yang berada di Indonesia dan mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.2 Indikator Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak langsung yaitu pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan Waluyo (2011:12). Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dinyatakan indikator Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2011:133) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Dari penjelasan di atas, maka indikator dari Wajib Pajak orang pribadi adalah selisih Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.1.2 Pelaporan Surat Pemberitahuan

2.1.2.1 Pengertian Pelaporan Surat Pemberitahuan

Surat Pemberitahuan menurut Madriasmo (2011:32) adalah : Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2011) adalah Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang.

2.1.2.2 Indikator Pelaporan Surat Pemberitahuan

Indikator jumlah wajib pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti Resmi (2011:127) yaitu jumlah wajib pajak Orang Pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam bentuk nominal.

2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Vergina dan Ratna (2013) definisi penerimaan pajak adalah sebagai berikut: Penerimaan yang diterima oleh pemerintah dari sektor pajak baik aspek pajak domestik maupun pajak internasional untuk memenuhi pengeluaran pemerintah.

Mardiasmo Andi. (2011: 139) definisi penghasilan sebagai berikut : Penghasilan yaitu setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Erly Suandy (2011:36) definisi pajak penghasilan adalah sebagai berikut : Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak.

Berdasarkan beberapa definisi dari para ahli di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi merupakan subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan

Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Siti Kurnia Rahayu (2013:72-73) yang mengungkapkan bahwa: Sasaran utama dari setiap sektor ekonomi adalah bagaimana memperoleh hasil sebesar-besarnya dari sumber-sumber yang terbatas. Hal ini berarti bahwa hasil realisasi pungutan pajak pada setiap kemungkinan skala ekonomi baru dianggap efisien untuk dilaksanakan apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak paling tidak mencapai jumlah tertentu sesuai perkiraan yang diharapkan.

Dari penjelasan di atas, maka indikator penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah hasil realisasi jumlah penerimaan pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Semakin banyak jumlah Wajib Pajak semakin tinggi jumlah penerimaan karena semakin banyak kontributornya (Mohammad Zain, 2008:30).Selanjutnya menurut Buyung Muniriyanto (2014) menyatakan bahwa: Penerimaan pajak secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan dua cara, yaitu meningkatkan tax coverage ratio dan tax compliance ratio. Tax coverage ratio dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak.

Peningkatan Jumlah wajib pajak berbanding lurus dengan penerimaan pph dimana jika penambahan jumlah wajib pajak setiap tahunnya mendorong kenaikan atau peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2.2.2 Pengaruh Pelaporan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:90) kebijakan perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan.

Menurut Rahmad, Herawti dan Dandes (2014) jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan surat pemberitahuan memberi efek besar terhadap terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa pelaporan surat pemberitahuan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut: Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka penulis menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1 : Terdapat pengaruh antara Peningkatan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

H_2 : Terdapat pengaruh antara Pelaporan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif dan Verifikatif,Dengan menggunakan metode penelitian ini penulis akan mengetahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas tentang obyek yang akan diteliti oleh penulis.

Menurut Iqbal Hasan (2004) dalam Syofian Siregar (2012: 211) Analisis Deskriptif adalah : Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel.

Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data dapat dikumpulkan, dianalisis, dan ditarik kesimpulan dengan teori-terori yang telah dipelajari.

Menurut Umi Narimawati, (2010:290) pengertian metode verifikatif adalah sebagai berikut : Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

Objek penelitian merupakan suatu sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal subjektif dimana pengukurannya dilakukan bebas dari pendapat dan penilaian subjektif. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Definisi operasionalisasi variabel terbagi menjadi pengoperasionalisasi konsep, dimensi, dan elemen (Hartono 2004). Pengoperasionalisasi konsep adalah menjelaskan karakteristik dari objek ke dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi yang menyebabkan konsep dapat diukur dan dioperasionalkan di dalam riset. Dimensi dari suatu konsep adalah bagian-bagian dari objek yang menunjukkan karakteristik-karakteristik utama dari objek konsep tersebut. Elemen merupakan perilaku yang dapat diobservasi dan diukur dari suatu konsep atau dimensi.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Independen/Bebas (X)
   Menurut Hamidi (2005: 75-76), Variabel Independen atau variabel bebas adalah Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
   Yang menjadi variabel indenpenden atau variabel bebas pada penelitian ini adalah Peningkatan Jumlah Wajib Pajak (X1) dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (X2)**.**
2. Variabel Dependen/Terikat (Y)
   Menurut Sugiyono (2012:59) pengertian variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.
   Dalam hal ini variabel dependen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah Penerimaan pajak penghasilan.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, di mana data diperoleh secara tidak langsung, artinya data-data tersebut berupa data yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu Penelitian Lapangan (Field Research) dan studi kepustakaan (LibraryReseach). Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (Field Research)
   Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung diperusahaan yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara:
   a. Observasi (Pengamatan Langsung)
      Dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke bagian staf pemeriksaan pajak, intensifikasi pajak dan penerimaan pajak. Sehinggga memperoleh data yang diperlukan.
   b. Dokumen-dokumen
      Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perusahaan. Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang diperlukan.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Reseach)
   Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelah literatur berupa buku - buku (text book), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan d engan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin teori yang diharapkan akan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

3.4 Penarikan Sampel

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sample jenuh, teknik sampling menurut Hermawan (2009:148) sebagai berikut: Teknik sampling adalah suatu proses pemilihan sejumlah elemen dari populasi sehingga dengan mempelajari sampel, suatu pemahaman karakteristik subjek sampel akan memungkinkan untuk menggeneralisasi karakteristik elemen populasi.

3.5 Metode Pengujian Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat pada regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik.

1. Uji Asumsi Klasik
   a) Uji Normalitas
      Ghozali (2011:58) menjelaskan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik dianggap tidak valid. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Cara untuk mengetahui normalitas residual adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Jika distribusi

data adalah normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011:62) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Asumsi multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi antar variabel independen. Deteksi ada tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variable Inflation Factor) dan tolerance. Model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF < 10, dan tolerance > 0,1 (10%). Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:

1. Jika nilai tolerance > 10 persen dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai tolerance < 10 persen dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011:65) uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. Cara untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Deteksi terhadap heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y dan sumbu X yang telah diprediksi, sumbu X adalah residual (Yprediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-standardized. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar di atasdan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Menurut Husein Umar (2011:182) autokorelasi adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian. Untuk data cross section, akan diuji apakah terdapat hubungan yang kuat di antara data pertama dan kedua, data kedua dengan ke tiga dan seterusnya. Jika ya, telah terjadi autokorelasi. Hal ini akan menyebabkan informasi yang diberikan menjadi menyesatkan. Oleh karena itu, perlu tindakan agar tidak terjadi autokorelasi. Pada pengujian autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi pada model regresi dan berikut nilai Durbin Watson yang diperoleh melalui hasil estimasi model regresi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan perhitungan nilain statistik Durbin-Watson. Kriteria uji: bandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel Durbin-Watson:

1) Jika D-W < dL atau D-W > 4 – dL, kesimpulannya pada data terdapat autokorelasi.
2) Jika dU < D-W < 4 – dU, kesimpulannya pada data tidak terdapat autokorelasi.
3) Tidak ada kesimpulan jika dL ≤ D-W ≤dU atau 4 – dU ≤ D-W ≤ 4-dL.

3.6 Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.6.1 Rancangan Analisis

Peneliti melakukan analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi dan pelaporan surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak pengahsilan pada KPP Pratama Cicadas dengan menggunakan analisis sebagai berikut:

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Umi Narimawati (2010:5), Analisis Regresi Linear Berganda adalah: Suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval.

Adapun penjelasan garis regresi menurut Andi Supangat (2010: 325) yaitu : Garis regresi (*regression line*/*line of the best fit*/*estimating line*) adalah suatu garis yang ditarik diantara titik-titik (*scatter diagram*) sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu berdasarkan variabel yang lain, dan dapat juga dipergunakan untuk mengetahui macam korelasinya (positif atau negatifnya).

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pelaporan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai indikator. Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X_1 dan X_2). Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Sumber: Sugiyono (2010 : 149)

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan
X_1 = Peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
X_2 = Pelaporan Surat Pemberitahuan
α = Konstanta Intersep
β_1 = Koefisien regresi variabel Peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
β_2 = Koefisien regresi variabel Pelaporan Surat Pemberitahuan
ε = Tingkat kesalahan (*error term*)

Arti koefisien β menunjukan hubungan searah antara variabel bebas dengan variabel terikat jika bernilai positif (+). Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan besarnya variabel bebas akan diikuti oleh peningkatan atau penurunan besarnya variabel terikat. Sedangkan jika nilai β negatif (-), menunjukan hubungan yang berlawanan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan kata lain, setiap peningkatan besarnya nilai variabel bebas akan diikuti oleh penurunan besarnya nilai variabel terikat dan sebaliknya. Selanjutnya untuk mengetahui apakah hubungan yang telah ada mempunyai kadar tertentu, maka harus melihat dua hal. Pertama, ada (dalam pengertian nyata atau berarti) atau tidak ada keterkaitan antara penerimaan pajak penghasilan (Y) dengan peningkatan jumlah wajib pajak (X_1) dan penerimaan pajak (Y) dengan pelaporan surat pemberitahuan (X_2).

Regresi linier berganda dengan dua variabel bebas X_1 dan X_2 metode kuadrat kecil memberikan hasil bahwa koefisien-koefisien a, b_1, dan b_2 dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\Sigma y = na + b_1\Sigma X_1 + b_2\Sigma X_2$$
$$\Sigma X_1 y = a\Sigma X_1 + b_1\Sigma X_1^2 + b_2\Sigma X_1 X_2$$
$$\Sigma X_2 y = a\Sigma X_2 + b_1\Sigma X_1 X_2 + b_2\Sigma X_2^2$$

Sumber: Sugiyono (2010 : 279)

2. Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen.

Analisis korelasi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui arah dan kuatnya hubungan antar variabel. Arah dinyatakan dalam positif dan negatif, sedangkan kuat atau lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi dapat dinyatakan -1 ≤ R ≤ 1 apabila:

1) Apabila (-) berarti terdapat hubungan negatif.
2) Apabila (+) berarti terdapat hubungan positif.

Untuk mencari koefisien korelasi antara variabel X_1 dan Y serta Variabel X_2 dan Y, adalah sebagai berikut :

(a) Koefisien korelasi parsial

Menghitung koefisien korelasi antara pemeriksaan pajak (X_1) terhadap penerimaan pajak (Y), menggunakan rumus:

$$rx_1y = \frac{\Sigma x_1 y}{\sqrt{\Sigma x_1^2 \cdot \Sigma y^2}}$$

Sumber: Sugiyono (2012:274)

(b) Koefisien korelasi parsial

Menghitung koefisien korelasi antara intensifikasi pajak (X_2) terhadap penerimaan pajak (Y), menggunakan rumus :

$$rx_2y = \frac{\Sigma x_1 y}{\sqrt{\Sigma x_2^2 \cdot \Sigma y^2}}$$

Sumber: Sugiyono (2012:274)

Keterangan:

r = Koefisien korelasi (-1≤ r ≥ +1), di mana :
x = Variabel bebas
y = Variabel terikat

3. Koefisien determinan

Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r2 \times 100\%$$

Sumber: Ridwan dan Sunarto (2007: 81)

Keterangan:

Kd = Koefisien Determinasi
r2 = Koefisien Korelasi

Tujuan metode koefisien determinasi berbeda dengan koefisien korelasi berganda. Pada metode koefisien determinasi, kita dapat mengetahui seberapa besar pengaruh peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi dan pelaporan surat pemberitahan terhadap penerimaan pajak penghasilan (lebih memberikan gambaran fisik atau keadaan sebenarnya dari kaitan peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi dan pelaporan surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak.

3.6.2 Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:159) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya korelasi dan pengaruh variabel independen X_1 dan X_2 secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Hipotesis yang diuji dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengujian secara parsial (Uji Statistik t)

Uji statistik t digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh signifikan secara parsial atau satu pihak dari masing-masing variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Hipotesis nol (H_0) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan Hipotesis alternatif (H_1) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, maka pengujian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(a) Menentukan hipotesis parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis statistik yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

$H_0 : \beta = 0$: Peningkatan jumlah Wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan

$H_1 : \beta \neq 0$: Peningkatan jumlah Wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan

$H_0 : \beta = 0$: Pelaporan Surat pemberitahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan

$H_1 : \beta \neq 0$: Pelaporan Surat pemberitahuan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan

(b) Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – l, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel – variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam suatu penelitian.

Menghitung nilai t_{hitung} dan membandingkannya dengan t_{tabel}. Adapun nilai t_{hitung}, dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber: Sugiyono (2012:230)

Keterangan:
t = Nilai uji t
r = Koefisien korelasi
n = Jumlah sampel

2. Menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan hipotesis

Penggambaran daerah penerimaan atau penolakan hipotesis beserta kriteria akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Hasil t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dengan kriteria:
   (a) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, hal ini diartikan Ha diterima dan artinya antara variabel X dan variabel Y memiliki pengaruh.
   (b) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penerimaan, hal ini diartikan Ha ditolak dan artinya antara variabel X dan variabel Y tidak memiliki pengaruh.
   (c) t_{hitung} dicari dengan rumus perhitungan thitung.
   (d) t_{tabel} dicari didalam tabel distribusi tstudent dengan ketentuan $\alpha = 0,05$ dan dk = (n – k – 1) atau 24 – 2 – 1 = 21.

3. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan gambar di atas, daerah yang diarsir merupakan daerah penolakan H_0, dan berlaku sebaliknya. Jika t_{hitung} dan F_{hitung} jatuh di daerah penolakan (penerimaan), maka H_0 ditolak (diterima) dan Ha diterima (ditolak). Artinya koefisian regresi signifikan (tidak signifikan). Kesimpulannya pemeriksaan pajak dan intensifikasi pajak berpengaruh (tidak berpengaruh) terhadap penerimaan pajak. Tingkat signifikannya yaitu 5 % (α = 0,05), artinya jika hipotesis nol ditolak (diterima) dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95 % dan hal ini menunjukan adanya (tidak adanya) pengaruh yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

4.1.1 Analisis Desktiptif

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian tentang peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cicadas, penjelasan tersebut memberikan gambaran tentang peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi melalui data jumlah wajib pajak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Penurunan rata-rata pada peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi tertinggi terjadi pada tahun 2015 karena pada tahun ini banyak masyarakat yang masih enggan mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak .

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Pelaporan Surat Pemberitahuan

Hasil penelitian tentang pelaporan surat pemberitahuan pada KPP Pratama Cicadas berupa jumlah nominal surat pemberitahuan yang lapor, penjelasan tersebut memberikan gambaran tentang pelaporan surat pemberitahuan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Rata-rata jumlah Surat pemberitahuan yang diperoleh pada tahun 2012 ke tahun 2013 dan tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 mengalami peningkatan,dilihat dari data rata-rata wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2012-2016 lebih besar dibandingkan SPT yang diterima. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat jika masih terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan surat pemberitahuannya.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil penelitian tentang penerimaan pajak pada KPP Pratama Cicadas berdasarkan pada realisasi penerimaan pajak, penjelasan tersebut memberikan gambaran tentang penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Secara keseluruhan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang diperoleh oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas mengalami kenaikan dan penurunan tiap tahunnya, hanya terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2014 dan tahun 2015.

4.1.2 Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan dengan menggunakan analisis kolmogorov smirnov atau analisis grafik normal probability plot. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat nilai asymp sig. pada uji kolmogorov smirnov jika lebih besar dari 0,05 maka data dinyatakan normal.

Dari tabel 4.1 dapat dilihat nilai signifikansi *(Asymp. Sig. (2-tailed))* dari uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,999 dan lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

b. Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini dilampirkan grafik scatterplot untuk menganalisis apakah terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas, adapun alat pengujian yang digunakan

oleh penulis adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (SDRESID) dengan residualnya (ZPRED).

Dari grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna di antara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). Untuk mengetahui suatu model regresi bebas dari multikolinearitas, yaitu dengan melihat angka VIF (*Variance Inflation Factor*) harus kurang dari 10 dan angka *tolerance* lebih dari 0,1.

Nilai *tolerance* yang diperoleh untuk kedua variabel bebas adalah sebesar 0,895 > 0,10 dengan nilai *VIF* sebesar 1,117 < 10. Hasil tersebut menunjukan bahwa variabel bebas dalam model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas, maka model telah memenuhi salah satu syarat untuk dilakukan pengujian regresi.

d. Uji Autokorelasi

Dengan melakukan uji Durbin Watson, dapat diketahui apakah terdapat autokorelasi antar sesama urutan pengamatan dari waktu ke waktu.

Hasil pengolahan diperoleh nilai statistik Durbin-Watson (D-W) sebesar 1,957. Sementara dari Tabel D-W dengan tingkat signifikan (a = 5%), untuk jumlah variabel bebas sebanyak 2 variabel (k = 2), dan jumlah pengamatan pada penelitian sebanyak 35 sampel (n = 35), maka diperoleh nilai batas bawah (dL) sebesar 1,343 dan batas atas (dU) sebesar 1,583. Karena nilai Durbin-Watson model regresi pada hasil pengolahan sebesar 1,957 dan lebih besar dari batas atas (dU) 1,583 serta kurang dari 4 – 1,583 (4 – dU), maka disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat autokorelasi. Karena keempat asumsi regresi sudah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model regresi sudah memenuhi syarat BLUE (Best Linear Unbias Estimation) sehingga dikatakan kesimpulan yang diperoleh dari model regresi sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

4.1.2.2 Analisis Pengaruh Peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pelaporan Surat Pemberitahuan terhadap Peneriman Pajak penghasilan

a. Persamaan Regresi *(Multiple Regression)*

Dengan menggunakan *software* SPSS 21, diperoleh hasil analisis regresi linier berganda. Dari perhitungan regresi yang telah diolah, maka diperoleh persamaan regresi linier sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = 7{,}507E7 + 64.598{,}780\ X_1 + 147.639{,}223X_2}$$

a (konstanta)= 7,507	Artinya jika Peningkatan Jumlah Wajib Pajak dan Pelaporan Surat Pemberitahuan bernilai konstan (nol)/tidak ada peningkatan, maka penerimaan pajak akan bernilai sebesar 7,507 Miliar.
b_1= 64.598,780	Artinya setiap peningkatan yang terjadi pada peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi, maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp. 64.598,780 Miliar.
b_2= 147.639,223	Artinya setiap peningkatan yang terjadi pada intensifikasi pajak, maka akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak sebesar Rp 147.639,223 Miliar.

b. Analisis Korelasi

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 21.0, diperoleh hasil yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Hubungan antara Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
  Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebesar 0,543. Jika diinterprestasikan menurut kriteria dalam Sugiyono (2012:250) maka korelasi Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi memiliki hubungan yang sedang. Nilai korelasi bertanda posistif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin tinggi Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, akan diikuti pula oleh semakin tingginya Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- Hubungan antara Pelaporan Surat Pemberitahuan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
  Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi bahwa nilai koefisien korelasi yang diperoleh Pelaporan Surat Pemberitahuan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebesar 0,616. Jika diinterprestasikan menurut kriteria dalam Sugiyono (2012:250) maka korelasi Pelaporan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi memiliki hubungan yang kuat. Nilai korelasi bertanda posistif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin tinggi Pelaporan Surat Pemberitahuan, akan diikuti pula oleh semakin tingginya Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

c. Analisis Koefisien Determinan

Perhitungan untuk memperoleh pengaruh dari setiap variabel bebas sebagai berikut:

$$Kd = (0,543)^2 \times 100\% = 29,5\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa pengaruh variabel jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu sebesar 29,5%, sedangkan sisanya sebesar 70,5% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti jumlah wajib pajak efektif, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain. Determinasi dari variabel pelaporan Surat Pemberitahuan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sebagai berikut:

$$Kd = (0,616)^2 \times 100\% = 37,9\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa pengaruh pelaporan Surat Pemberitahuan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu sebesar 37,9%, sedangkan sisanya sebesar 62,1% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti surat paksa, penghindaran pajak, penggelapan pajak, penagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan lain-lain.

d. Uji Hipotesis (Uji T)

Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji t. Rumusan hipotesis yang akan diuji menggunakan program SPSS,.Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Pengujian Hipotesis Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

$H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya, peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
$H_1 : \beta_1 = 0$ Artinya, peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
Kriteria : Tolak H_0 jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel}, terima dalam hal lainnya.

Terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 2,946. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan df=n-k-1=35-2-1= 32, diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar ± 2,037. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh (2,946), berada diantara nilai t_{tabel} (-2,037 dan 2,037), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadiberpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

2. Pengujian Hipotesis Pelaporan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

$H_0 : \beta_2 = 0$ Artinya, pelaporan Surat Pemberitahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
$H_1 : \beta_2 = 0$ Artinya, pelaporan Surat Pembberitahuan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
Kriteria : Tolak H_0 jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel}, terima dalam hal lainnya.

Dari tabel 4.8, terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh variabel Pelaporan Surat Pemberitahuan sebesar 3,762. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} pada tabel distribusi t. Dengan df=n-k-1=35–2–1=32, diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar ± 2,037. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh (3,762), berada diantara nilai t_{tabel} (-2,037 dan 2,037), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya Pelaporan Surat Pemberitahuan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara Peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu sebesar 0,543 yang tergolong dalam kategori sedang. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan Peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Besar pengaruh Peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu sebesar 11,02%, artinya sebesar 11,02% penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dipengaruhi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan sisanya sebesar 88,98% dipengaruhi oleh faktor lain seperti jumlah wajib pajak efektif, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan, kesadaran Wajib Pajak, pelaksanaan administrasi pajak, dan lain-lain.

Hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,946 > 2,037), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Nilai signifikasi untuk variabel peningkatan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak adalah 0,006 artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah sebesar 0,6%, lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu sebesar 5% maka peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Kesimpulan diatas telah menjawab fenomena yang terjadi di Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I telah berhasil meraup penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp 21,6 triliun atau sekitar 84,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 25,6 triliun. Artinya, penerimaan pajak pada tahun ini masih di bawah target. Seharusnya menurut teori yang

dikemukakan oleh para ahli bahwa penerimaan pajak secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan dua cara, yaitu meningkatkan *tax coverage ratio* dan *tax compliance ratio*. *Tax coverage ratio* dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak (Buyung Muniriyanto, 2014).

Hasil penelitian ini didorong oleh penelitian Amina (2013), menyatakan bahwa peningkatkan jumlah wajib pajak sangat mendukung penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Hubungan jumlah pajak dinyatakan sangat kuat, hubungan ini menunjukkan semakin besar peningkatan jumlah wajib pajak, maka semakin besar jumlah penerimaan Pajak Penghasilan.

4.2.2 Pengaruh Pelaporan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara pelaporan Surat Pemberitahuan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu sebesar 0.616 yang tergolong dalam kategori kuat. Hubungan yang bersifat positif artinya setiap kenaikan pelaporan Surat Pemberitahuan maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Besar pengaruh pelaporan Surat Pemberitahuan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yaitu sebesar 37,9%, artinya sebesar 37,9% penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dipengaruhi oleh pelaporan Surat Pemberitahuan, sedangkan sisanya sebesar 62,1% dipengaruhi oleh faktor lain seperti surat paksa, penghindaran pajak, penggelapan pajak, penagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan lain-lain.

Hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah t_{hitung} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,762 > 2,037), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel pelaporan Surat Pemberitahuan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Nilai signifikasi untuk variabel pelaporan Surat Pemberitahuan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah 0,001 artinya kesalahan untuk mengatakan ada pengaruh terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 0,1%, lebih kecil dari tingkat kesalahan yang dapat diterima yaitu sebesar 5%. Kesimpulannya, pelaporan Surat Pemberitahuan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Kesimpulan diatas telah menjawab fenomena yang terjadi di Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat yang menyampaikan surat pemberitahuan tahunan Surat Pemberitahuan pajak dirasakan masih kurang. Dari target 72%, hingga dua hari menjelang penutupan masa penyampaian Surat Pemberitahuan Tuhan, hanya 52% wajib pajak yang melapor. Seharusnya menurut teori yang dikemukakan oleh para ahli bahwa kebijakan perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (Rochmat Soemitro yang dikutip Siti Kurnia Rahayu, 2010:90).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah di lakukan oleh Ayu Rahayu (2010) pada tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang ada di daerah Bandung, memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang searah antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang ditandai dengan jumlah penyetoran Surat Pemberitahuan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Tetapi terdapat hubungan yang berlawanan arah di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, artinya di saat penyetoran Surat Pemberitahuan meningkat tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah, kerangka pikir, hipotesis penelitian, hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dimana jika jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi juga akan meningkat begitu pun jika sebaliknya. Fenomena yang terjadi pada Kanwil DJP Jawa Barat I telah berhasil meraup penerimaan pajak tahun 2015 sebesar Rp 21,6 triliun atau sekitar 84,13% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 25,6 triliun. Artinya, penerimaan pajak pada tahun ini masih di bawah target,dipengaruhi oleh jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Pelaporan Surat Pemberitahuan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dimana jika jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan meningkat maka penerimaan pajak penghasilan orang pribadi juga akan meningkat begitu pun jika sebaliknya. Fenomena yang terjadi pada Kanwil DJP Jawa Barat yang menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak dirasakan masih kurang. Dari target 72%, hingga dua hari menjelang penutupan masa penyampaian Surat Pemberitahuan, hanya 52% wajib pajak yang melapor. Hal tersebut mempengaruhi pencapaian penerimaan pajak.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

a. Saran Praktis :

1. Agar jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami peningkatan, sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak lebih meningkatkan lagi sosialisasi atau pengarahan kepada masyarakat umum sehingga dapat meningkatkan kesadaran para masyarakat untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Agar meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi melalui pelaporan Surat Pemberitahuan disarankan wajib pajak dalam mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan yang akan dilaporkan sehingga tidak akan menimbulkan kesalahan dalam melapor dan juga dalam penyetoran pajak.

b. Saran Akademis :

1) Bagi Perkembangan Ilmu
   Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pajak diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan.
2) Bagi peneliti Lain
   Diharapkan peneliti selanjutnya dapat meneliti Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pelaporan Surat Pemberitahuan dengan standar pengukuran yang berbeda dari penelitian ini,serta diharapkan dapat meneliti variabel-variabel lain selain Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pelaporan Surat Pemberitahuan, karena terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan. Selain itu, penulis menyarankan untuk menambah periode tahun yang akan diteliti dan menambah objek lainnya agar dapat memperkuat hasil penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi,* PT, Rineka Cipta, Jakarta.

Ayu Rahayu. (2010).”*Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung*”. Skripsi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

Bungin, Burhan, 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*, Prenada Media, Jakarta.

Buyung Muniriyanto. 2014. *Kepatuhan Wajib Pajak Kunci Penerimaan Negara*. http://www.pajak.go.id/content/article/kepatuhan-wajib-pajak-kunci-penerimaan-negara

Erly Suandy, 2011 Edisi 5. *Perencanaan Pajak.Jakarta*: Penerbit Salemba Empat.

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*.Semarang : Universitas Dipenogoro.

Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian.* Malang: UMM PRESS

Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Judisseno. Rimsky K. 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan Indonesia. Cetakan Kedua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.

Mohammad Zain. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Nasution, Rahmad Husein, Herawati & Dandes Rifa. (2014). *Pengaruh Inflasi, Jumlah Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kota Padang*. E-Jurnal Universitas Bung Hatta, 4(1).

Resmi, Siti,.Edisi 6 2011.*Perpajakan Teori dan Kasus*,Jakarta: Salemba Empat.

Ridwan dan Sunarto. 2007. *Pengantar Statistik untuk Penelitian Sosial Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis.* Bandung: Afabeta

Rosdiana.2006.*Model Hubungan kausal kesadaran,pelayanan,kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak*.jurnal keuangan publik,4(1),105-121.

Siti Kurnia Rahayu. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Bandung: Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati,2010 .*PERPAJAKAN INDONESIA*, Yogyakarta : Graha Ilmu.

Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Afabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta

Sugiyono. 2012.*Metode Penelitian Bisnis.* Bandung : Alfabeta.

Tresno, Indra dan Wulan. 2012. *Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman*. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta: Disertai yang tidak dipubikasikan.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Genesis

Vergina dan Ratna. 2013. *Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.* Jurusan Akuntansi STIE MDP.

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta

Yudi Hariyanto, Sudahak dan Siti Ragil. 2014. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi pada Kantor Pelayanan Pratama Malang Utara Periode 2010-2013)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Volume 10 Nomor 1.